

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR

POLICY IMPLEMENTATION MODEL OF TOURISM DEVELOPMENT IN ORDER TO INCREASE TOURISM DESTINATION PLACES IN BOGOR REGENCY

D Hernawan^{1a} dan G Pratidina¹

¹ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

^a Korespondensi: Denny Hernawan, Email: denny.hernawan@unida.ac.id
(Diterima: 12-07-2015; Ditelaah: 14-07-2015; Disetujui: 19-07-2015)

ABSTRACT

Tourism in Bogor Regency is very potential and have to managed and benefited optimally trough the implementation of tourism development program. For that purpose, the program will be a trigger for regional development and the increasing number of tourist. The main theory used to analyze in this reseach is Van Meter and Van Horn's theory or model of policy implementation, which stated that the policy outcome or policy result is determined by several factors such as standard and objectives, resources, communication among related organizations, the characteristics of implementors, the attitude of implemntors, and social, political, and economic conditions. This research use decriptive-analytical method with unit of analysis consist of 2 components: *implementors* (Cultural and Tourism Agency with 18 structural officials as purposive sample), and policy targets (tourism destination administrators with privately managed, local/cenral agency, corporate, and community/faundation as purposive sample). Basen on analysis result it can be described that there are several problems encountered by local government related to tourism development namely : lack of competence and professional human resources, especially with tourism competency; lack of good infrastructure to and from tourism destination places; and lack of coordination among related-parties/agencies. This condition is supported by WMS score for policy implementation variable, that is 3,37 (in scale of 5) which mean that the implementation performance of tourism in Bogor Regency is "moderate" in category. In order to make tourism development get better in the future, so policy implementataion should focused mainly on 3 areas of improvement namely : capacity building for human resource in tourism (quantity and quaity); availability and improvement of infrastructure to increase accessibility to tourism destination places; and impromevent in coordination mechanism among related agencies/paries.

Key words: tourism destination places, policy implementation, Van Meter dan Van Horn's model, tourism development

ABSTRAK

Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu *implementors* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi

lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rata-rata terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori “cukup baik”. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

Kata kunci: destinasi pariwisata, implementasi kebijakan, model Van Meter dan Van Horn, pengembangan pariwisata.

Hernawan D dan G Pratidina. 2015. Model implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan destinasi pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora* 6(2): 94 - 103.

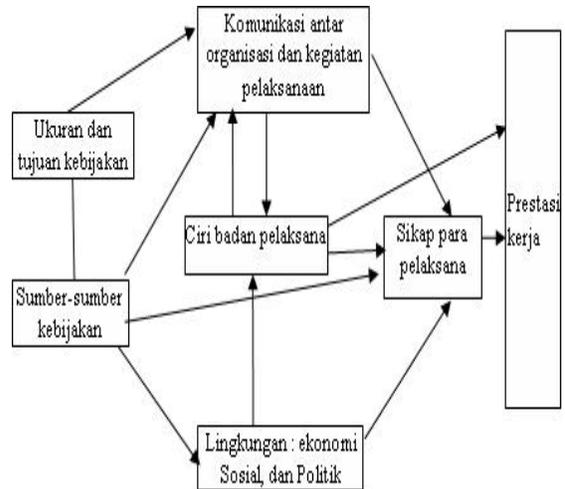
PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan menjadikan magnet tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjunginya, terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Namun, animo wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata di Bogor masih terkonsentrasi di daerah Puncak dan sekitarnya. Oleh karena itu, modal potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat-tempat pariwisata yang dapat dikunjungi para wisatawan. Dengan demikian, diharapkan destinasi pariwisata yang menjadi tujuan wisatawan akan menyebar, tidak hanya Puncak saja tetapi merata ke tempat-tempat wisata lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih belum efektifnya kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor yang diindikasikan belum meratanya sebaran objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan dan cenderung Puncak sentris.

Untuk memahami realitas tersebut, *tools* berupa model implementasi kebijakan dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran dan jawaban tentang seberapa efektif kinerja kebijakan pariwisata di Kabupaten Bogor diimplementasikan. Dalam konteks inilah urgensi penelitian ini harus diletakkan karena tidak hanya memiliki nilai pragmatis untuk diterapkan bagi kepentingan *policy improvement*, maupun nilai ilmiah dalam memperkaya khazanah konseptual khususnya terkait studi implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penelitian hibah ini adalah model

implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

MATERI DAN METODE

Materi

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan antara lain: (1) standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) disposisi atau sikap para pelaksana; (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang *crucial*.

Sumber Daya

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa *new town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*. Van Mater dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa sumber daya

kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Edward III, dua karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *standard operating procedures*) dan fragmentasi.

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) dikembangkan sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
- b. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara, dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units* (Edward III 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974), apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi

standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn 1975). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Van Mater dan Van Horn (1974) juga menjelaskan bahwa disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat memengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain: (1) pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, (2) arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan (3) intensitas terhadap kebijakan

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974).

Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Metode

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tahun pertama ini dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap data tentang model implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor. Data diperoleh dari hasil lokakarya atau seminar FGD, hasil analisis data primer dan sekunder, serta analisis SWOT.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola objek pariwisata yang berada di Kabupaten Bogor. Berdasarkan metode kualitatif, sampel dalam penelitian ini ditetapkan di 18 tempat rekreasi terpilih (mewakili delapan kawasan pariwisata dan empat zona wilayah pariwisata) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. Teknik pemilihan responden adalah *purposive sampling* dengan pertimbangan responden yang terpilih harus berasal dari kelompok target yang ada pada populasi, yaitu pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

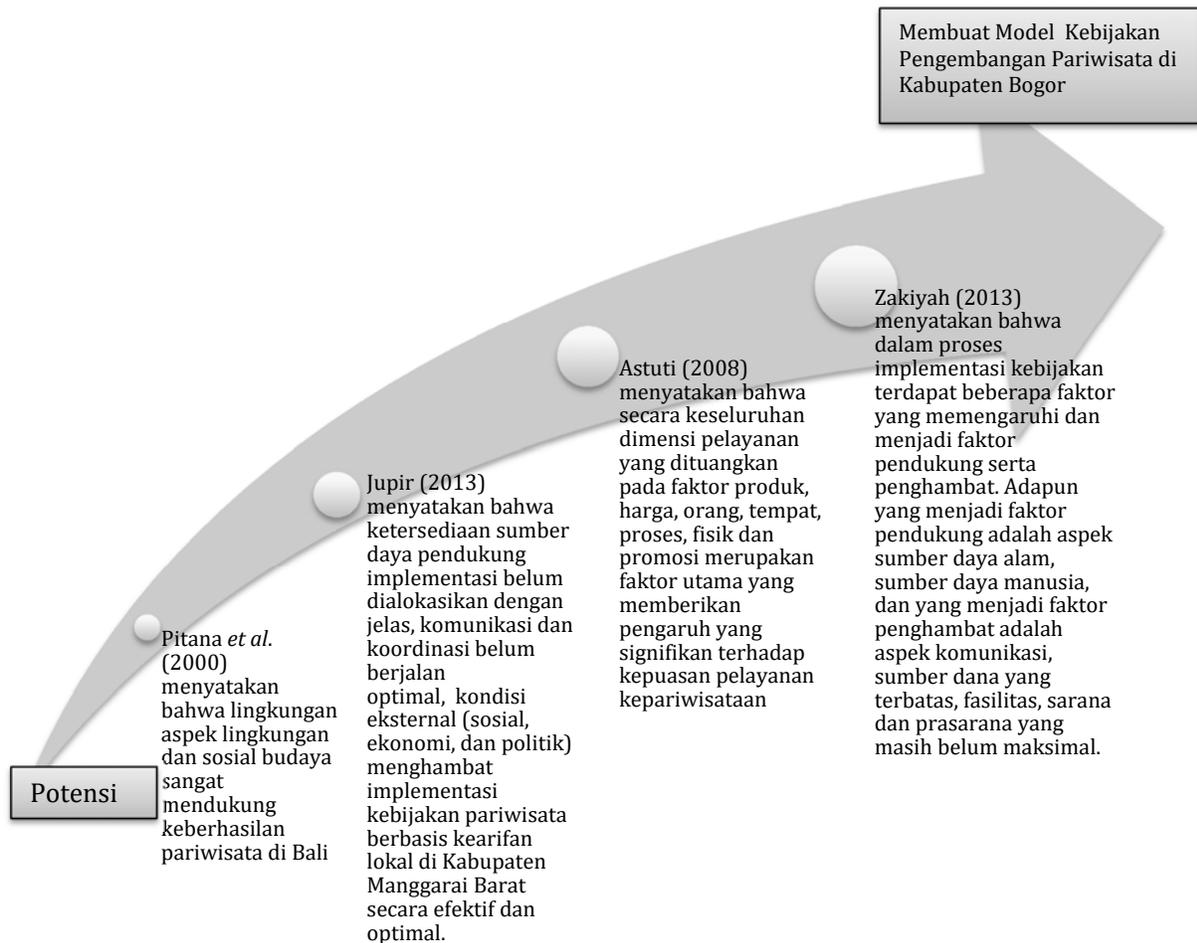
Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut.

1. *Desk study* yaitu pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan kegiatan penelitian.
2. Metode survei yaitu pengumpulan data dengan *in depth interview* dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD).

Studi pustaka atau literatur merupakan kegiatan studi untuk mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan penyusunan laporan.

Roadmap Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Lingkungan Strategis Sektor Kepariwisataan

Dengan mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bogor (2014) disebutkan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. kebijakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata diarahkan pada:
 - a. menata pengembangan kegiatan pariwisata pada setiap destinasi sesuai karakteristik daya tarik unggulan dan daya dukung lahan;
 - b. mempertahankan daya saing yang sudah ada pada destinasi wisata perkotaan, destinasi ekowisata, serta destinasi wisata MICE dan rekreasi;
- c. melakukan penyebaran pertumbuhan pada destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan, dan destinasi wisata kreatif;
2. kebijakan pembangunan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata antara lain:
 - a. mendorong terciptanya komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antar berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
 - b. mendorong terciptanya destinasi pariwisata Kabupaten Bogor yang ramah lingkungan, berbudaya, dan berbudi luhur;
3. kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
4. kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata;
5. kebijakan pembangunan dan pengembangan pemasaran pariwisata antara lain:

- a. mengarahkan pendekatan *market driven* kepada pemangku kepentingan pemasaran pariwisata Kabupaten Bogor;
- b. pengembangan identitas dan pengembangan target pasar baru Kabupaten Bogor;
- c. mengembangkan kerja sama promosi dan pemasaran tidak hanya dengan BPW dan APW, namun juga dengan berbagai LSM dan organisasi komunitas;
- d. membangun dan memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang sudah dimiliki Kabupaten Bogor.

Analisis Lingkungan Strategis

Analisis terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata dan budaya perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata dan budaya sesuai keadaan potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Bogor.

Lingkungan Strategis Internal

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai daerah tujuan wisata yang berwawasan lingkungan perlu upaya-upaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya agar meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Bogor guna meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sehubungan hal tersebut guna menentukan langkah-langkah dan strategis pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata dan budaya secara tepat perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap lingkungan strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahannya.

1. Kekuatan (*Strength*)

Beberapa hal terkait faktor kekuatan (*strength*) antara lain:

- a. tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah;
- b. tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai;
- c. tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja;
- d. terjalannya hubungan kerja yang baik dengan *stakeholder* kepariwisataan dan kebudayaan;

- e. tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi;
- f. tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa hal terkait faktor kelemahan (*weakness*) antara lain:

- a. belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. belum memiliki bank data kepariwisataan dan kebudayaan yang lengkap;
- d. terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan;
- e. lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar-OPD) dalam mendukung pembangunan pariwisata;
- f. belum tersedianya arah kebijakan pariwisata daerah (Riparda).

Lingkungan Strategis Eksternal

Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata dan budaya, perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.

1. Peluang (*Opportunity*)

Beberapa hal terkait peluang (*opportunity*) antara lain:

- a. pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan;
- b. potensi seni, budaya, objek wisata, dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor cukup besar;
- c. posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan bandara internasional Soekarno-Hatta serta berada pada jalur lintasan antarkota di Jawa Barat;
- d. kondisi sosial masyarakat yang cukup mendukung;
- e. kondisi keamanan di Kabupaten Bogor cukup menunjang;
- f. tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;

- g. tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih, dan lain-lain);
- h. perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
- i. tren perkembangan *green tourism*.

2. Ancaman (*Threat*)

Beberapa hal terkait ancaman (*threat*) antara lain:

- a. perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat;
- b. ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
- c. masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
- d. keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;
- e. masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
- f. penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai.

Strategi S-O

Beberapa hal mengenai strategi S-O antara lain:

- 1. mempertahankan dan meningkatkan wisatawan asal Jabodetabek dan sekitarnya sebagai pasar utama yang sudah ada;
- 2. menata dan mengembangkan potensi wisata alam dalam rangka meningkatkan daya tariknya;
- 3. mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata seni atau budaya dan objek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya tarik wisata;
- 4. meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan kepariwisataan terutama masyarakat di sekitar objek wisata atau kawasan wisata;
- 5. peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi;
- 6. meningkatkan pelayanan terhadap tamu atau wisatawan;
- 7. mendorong usaha pariwisata yang berbasis lingkungan (*green tourism*);
- 8. mendorong pengembangan Desa Wisata.

Strategi W-O

Beberapa hal mengenai strategi W-O antara lain:

- 1. menyusun Riparda;
- 2. melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor;
- 3. meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- 4. mendorong ketersediaan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kompetensi dalam bidang budaya dan pariwisata.

Strategi S-T

Beberapa hal mengenai strategi S-T antara lain:

- 1. mendorong pengembangan infrastuktur jalan yang memadai dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan;
- 2. mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat;
- 3. melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata (*community based tourism*);
- 4. meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro perjalanan wisata di DKI Jakarta dan Bogor dalam penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor;
- 5. melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata.

Strategi W-T

Beberapa hal mengenai strategi W-T antara lain:

- 1. melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki lima (PKL);
- 2. merencanakan dan mengusulkan anggaran program atau kegiatan pengembangan pariwisata dan mengupayakan minat dan peran serta investor swasta.

Identifikasi Permasalahan Sektor kepariwisataan

Selain hasil analisis SWOT, penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengembangan

sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Dengan merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dirumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai, terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Bogor. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Bogor itu sendiri yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan

Secara umum, daya saing unit bisnis pariwisata Kabupaten Bogor masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (*length of stay*) dan pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) di Kabupaten Bogor. Dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

3. Masih rendahnya aksesibilitas menuju ke objek wisata

Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di kabupaten relatif baik, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kualitas maupun kuantitas jalan menuju objek wisata masih relatif rendah.

4. Masih kurangnya penanganan kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata

Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten Bogor relatif baik, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi kemacetan di jalur wisata terutama di jalur Puncak. Problem kemacetan ini akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi wisatawan yang datang maupun bagi pelaku usaha di sekitar jalur tersebut. Apabila tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan

kemacetan ini akan berdampak buruk bagi pengembangan pariwisata ke depannya.

5. Masih rendahnya aksesibilitas menuju ke objek wisata

Meskipun secara umum kualitas jalan di Kabupaten Bogor sudah baik, akan tetapi masih banyak jalan-jalan menuju objek wisata yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, jalan menuju ke kawasan wisata Gunung Salak Endah. Jalan menuju ke kawasan wisata tersebut relatif sempit sehingga jalan tersebut sukar untuk dilalui oleh mobil besar seperti bus. Oleh karena itu, di kawasan ini sering terjadi kemacetan yang tentunya akan mengurangi kenyamanan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya.

6. Masih terbatasnya objek wisata yang sudah tertata

Kesiapan objek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Di samping besarnya potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor, ternyata masih banyak potensi objek wisata yang belum tertata dan yang sudah tertata pun masih belum maksimal dalam penyajiannya.

7. Masih rendahnya koordinasi dan persamaan persepsi di antara OPD terkait

Koordinasi merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan koordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Diakui bahwa sektor pariwisata merupakan *end user* terhadap sarana dan prasarana yang ada. Sementara itu, kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Tingkat Keberhasilan Kebijakan Sektor Kepariwisataan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil seperti ini dapat dicapai berkat kerja keras dan soliditas seluruh personil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di samping itu, hasil ini juga dicapai berkat adanya taat azas terhadap pencapaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran.

Hal yang paling menonjol dari pencapaian kinerja ini adalah dalam peningkatan kunjungan

wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ini antara lain meningkatnya kegiatan promosi dan inovasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, semakin sinerginya pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah dalam hal promosi serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di lingkungan sekitarnya sehingga semakin menumbuhkan sikap di kalangan masyarakat untuk berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan.

Sementara itu, dari hasil survei dan observasi di lapangan ditemukan sejumlah poin penting terkait kondisi *existing* kepariwisataan di Kabupaten Bogor, yaitu:

1. ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas masih terbatas. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata di Kabupaten Bogor;
2. masih rendahnya aksesibilitas menuju ke objek wisata. Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua destinasi wisata tersebut dapat diakses dengan menggunakan angkutan umum dan kondisi jalan yang cukup buruk (berbatuan);
3. masih rendahnya koordinasi dan persamaan persepsi di antara OPD terkait, padahal aspek koordinasi merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Diakui bahwa sektor pariwisata merupakan *end user* terhadap sarana dan prasarana yang ada, sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
4. inkonsistensi dari komitmen Bupati dalam merumuskan dan mengimplemenasikan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor;
5. inkonsistensi antara implementasi RT dan RW dengan pemanfaatan riil ruang untuk kepentingan industri pariwisata;
6. keterbatasan anggaran untuk bidang pariwisata.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. kebijakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata diarahkan pada: (a) menata pengembangan kegiatan pariwisata setiap destinasi sesuai karakteristik daya tarik unggulan dan daya dukung lahan; (b) mempertahankan daya saing yang sudah ada pada destinasi wisata perkotaan, destinasi ekowisata, destinasi wisata MICE dan rekreasi; (c) melakukan penyebaran pertumbuhan pada destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan serta destinasi wisata kreatif;
2. kinerja sektor kepariwisataan di Kabupaten Bogor menunjukkan efektivitas yang baik dari capaian target dari 11 indikator kepariwisataan (mulai dari penyelenggaraan festival seni dan budaya sampai penyediaan akomodasi), namun masih ditemukan sejumlah masalah yang menghambat optimalisasi potensi kepariwisataan yang ada;
3. sejumlah permasalahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan sektor pariwisata di antaranya adalah: (a) ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas masih terbatas, terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata di Kabupaten Bogor; (b) masih rendahnya aksesibilitas menuju ke objek wisata; (c) masih rendahnya koordinasi dan persamaan persepsi di antara OPD terkait padahal aspek koordinasi merupakan hal yang penting di dalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Diakui bahwa sektor pariwisata merupakan *end user* terhadap sarana dan prasarana yang ada, sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; (d) inkonsistensi dari komitmen Bupati dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor; (e) inkonsistensi antara implementasi RT dan RW dengan pemanfaatan riil ruang untuk kepentingan industri pariwisata; (f) keterbatasan anggaran untuk bidang pariwisata.

Adapun beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. untuk mengatasi masalah terkait dengan ketersediaan SDM bidang kepariwisataan, maka upaya pemerintah untuk menambah pegawai baru yang mempunyai kompetensi bidang kepariwisataan harus menjadi prioritas bila jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi pariwisata di Kabupaten Bogor ingin meningkat;
2. untuk meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat destinasi wisata maka pembenahan (perbaikan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana (terutama jalan) harus diprioritaskan penganggarnya oleh Pemkab Bogor. Penganggaran tersebut bisa bersumber dari APBD maupun melalui kemitraan dengan pengelola tempat wisata yang dikelola pihak swasta;
3. meningkatkan upaya koordinasi lintas-sektoral di bidang kepariwisataan dengan OPD terkait, pengelola tempat pariwisata,

asosiasi usaha pariwisata, serta *Civil Society Organization*. Bentuknya bisa berupa forum komunikasi, tim satgas, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. Alfa Beta, Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2013–2018.
- Edward III GC. 1980. Implementing public policy. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Grindle MS. 1980. Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press, New Jersey.
- Jupir MM. 2013. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. Vol 1, Januari 2013.
- Meter DV dan CV Horn. 1975. The policy implementation process: a conceptual framework dalam administration and society 6. Sage, London.
- Pitana IG *et al.* 2000. Daya dukung Bali dalam pariwisata (kajian dari aspek lingkungan dan sosial budaya). Unud-Bappeda Provinsi Bali, Denpasar.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bogor 2014.